

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, pembangunan menjadi isu yang krusial di setiap negara. Pembangunan tidak hanya pada fisik saja, melainkan juga pembangunan non-fisik seperti, pendidikan dan kesehatan. Pada dasarnya, pembangunan adalah proses transformasi yang mencakup seluruh struktur masyarakat, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, institusi, dan budaya. Oleh sebab itu, pembangunan sangat penting dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga nya.

Pembangunan yang perlu dilakukan adalah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Menurut *Stockholm United Nation Conference of Human Environmental* pada tahun 1972 atau lebih dikenal sebagai “Deklarasi Stockholm”, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai segala sumber daya alam yang berada di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna terutama contoh yang memperantarai ekosistem alam, harus dijaga agar aman guna kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang tepat.

Salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang sedang gencar dilakukan oleh petinggi-petinggi di

berbagai negara dalam pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu komponen pembangunan nasional adalah pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang terbaik. Kesehatan adalah hak asasi dan hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah, menurut Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945. Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui UU Kesehatan. Melalui strategi 5 pilar, Jokowi telah berkomitmen untuk mengurangi stunting, atau kekurangan gizi pada anak. Setwapres dan TNP2K membangun komitmen dan visi kepemimpinan untuk Pilar 1. Kominfo dan Kemeskes bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan perubahan perilaku dan melaksanakan kampanye nasional. Pilar 3 mencakup konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemendagri, serta kementerian dan lembaga nasional lainnya. Pilar empat membahas gizi dan ketahanan pangan oleh Kementan dan Kemenkes, dan pilar lima membahas pengawasan dan evaluasi oleh Setwapres dan TNP2K (Kemenkes RI, 2019).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah stunting, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kebijakan sinkronisasi dari pemerintah pusat hingga desa, dan secara horizontal, setiap tingkat pemerintah berkolaborasi dengan lintas bidang. Pemerintah daerah kabupaten/kota berperan penting dalam pembentukan kebijakan, program, dan pembiayaan yang berkaitan

dengan pencegahan stunting.

Tujuan dilakukannya pembangunan ini adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, sehingga pembangunan di bidang lain seperti pendidikan dan ekonomi dapat berjalan secara optimal. Saat ini, status gizi masih menjadi isu internasional. Gizi merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia yang mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Asupan gizi adalah suatu hal yang penting bagi tubuh untuk melakukan fungsinya seperti, energi, membangun dan memelihara jaringan. Pemberian asupan gizi yang tepat terutama terhadap anak dapat menurunkan masalah gizi, dimana anak yang mengkonsumsi makanan beragam memiliki tingkat kesehatan yang baik (Frempong, 2019).

Salah satu elemen penting dalam pembangunan kesehatan adalah peningkatan kesehatan balita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga kesehatan balita sangat penting karena masa balita adalah periode perkembangan penting dalam kehidupan seseorang (Hildayani et al., 2014):

1. Perkembangan dan Pertumbuhan Maksimal Balita sedang mengalami periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Kesehatan yang baik membantu pertumbuhan yang optimal secara fisik dan mental. Untuk memastikan balita tumbuh menjadi orang yang sehat dan berkembang dengan baik, perawatan medis yang tepat, imunisasi, dan nutrisi yang cukup sangat penting (Sufa et al., 2023).
2. Daya Tahan Tubuh yang Kuat: Sistem kekebalan tubuh balita belum sempurna.

Membangun daya tahan tubuh yang kuat dapat dicapai melalui perawatan kesehatan yang baik selama masa ini. Salah satu cara penting untuk melindungi balita dari penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan mereka adalah imunisasi.

3. Pencegahan Penyakit: Tubuh bayi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit lainnya. Perawatan kesehatan yang tepat, termasuk imunisasi, membantu mencegah penyakit tersebut menyebar.
4. Pembentukan Kebiasaan Hidup Sehat: Pola hidup sehat biasanya diajarkan dan diterapkan saat bayi (Kraaket al., 2005). Ini cenderung terjadi hingga dewasa. Gaya hidup yang positif dapat dibangun melalui konsumsi makanan yang sehat, aktivitas fisik, dan perawatan diri yang baik.
5. Kemampuan Kognitif dan Mental: Kesehatan balita juga berdampak pada kemampuan mental dan kognitif mereka (Duncan, 2003). Pada tahap ini, gizi dan stimulasi yang cukup dapat membantu perkembangan otak yang optimal, yang penting untuk kemampuan belajar dan beradaptasi di masa depan.
6. Pencegahan Gangguan Kesehatan Jangka Panjang: Upaya kesehatan sejak masa balita dapat membantu mencegah diabetes, obesitas, dan penyakit kronis lainnya di kemudian hari (Ayuningtyas & Rayhani, 2018).
7. Kualitas Hidup Keluarga: Kesehatan balita memengaruhi kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Ketika seorang bayi sehat, tekanan

keluarga untuk menangani masalah kesehatan mereka dapat berkurang, dan kebahagiaan keluarga cenderung meningkat.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan balita tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua semata; itu juga dapat dianggap sebagai investasi strategis untuk membentuk masa depan secara keseluruhan baik untuk individu maupun masyarakat (Kurniawidjadjaet al., 2021).

Berdasarkan jurnal *The new Joint Child Malnutrition Estimates of 2023 supersede former analyses and results published by UNICEF, WHO and the World Bank Group* menunjukkan angka stunting berada pada 148.1 juta kasus terjadi pada anak dibawah lima tahun. Angka stunting tersebut terpaut jauh dengan angka *overweight* atau kelebihan berat badan yang sebanyak 37 juta kasus pada anak dibawah lima tahun dan *wasting* atau kondisi badan yang kurus berada pada angka 45 juta kasus pada anak dibawah lima tahun pada tahun 2022.

Salah satu permasalahan gizi adalah fenomena *stunting*. Stunting adalah masalah kesehatan di mana anak-anak mengalami kegagalan tumbuh kembang karena kekurangan gizi jangka panjang. Kekurangan gizi ini terjadi selama *Golden Period* menyebabkan sel otak anak tidak tumbuh dengan baik dan menghambat pertumbuhan optimal mereka (Probosiwi, 2017).

Berdasarkan *databook.id*, jumlah balita yang mengalami kekurangan gizi di beberapa negara ASEAN, Indonesia memiliki jumlah balita kurang gizi tertinggi dengan 17,7 juta anak, diikuti oleh Thailand

dengan 6,2 juta, Filipina dengan 5,7 juta, dan Vietnam dengan 5,6 juta balita. Myanmar mencatat angka yang lebih rendah, yaitu 1,7 juta, sementara Kamboja memiliki 1 juta balita yang kurang gizi. Laos dan Timor Leste mencatat jumlah yang lebih kecil dengan masing-masing 400 ribu dan 300 ribu balita. Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam tidak memiliki data angka balita kurang gizi yang ditampilkan. Data ini menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius di banyak negara ASEAN, terutama di negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia.

Tabel 1. 1 Data Kurang Gizi Balita di ASEAN

Data Kurang Gizi Balita di ASEAN 2022	
Indonesia	17,7 juta
Thailand	6,2 juta
Filipina	5,7 juta
Vietnam	5,6 juta
Myanmar	1,7 juta
Kamboja	1 juta
Laos	400 ribu
Timor Leste	300 ribu
Malaysia	Data tidak ada
Singapura	
Brunei Darussalam	

Sumber : databooks.id

Berdasarkan data SSGI tahun 2022, status gizi di Indonesia terbagi menjadi empat jenis yaitu, *stunting*, *wasting*, *underweight*, dan *overweight*. Dari keempat status gizi tersebut, prevalensi stunting menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan status gizi lainnya.

Tabel 1. 2 Tren Status Gizi Balita di Indonesia 2022

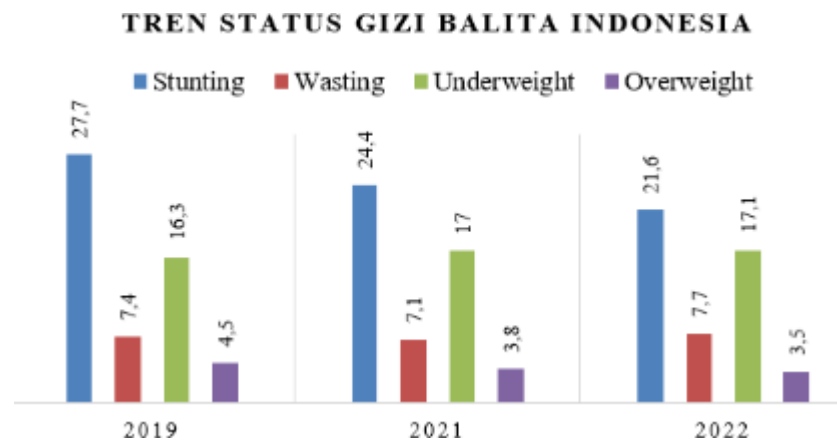
	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI		
	2013	2018	2019	2021	2022
<i>Stunting</i>	37,6	30,8	27,7	24,4	 2,8 21,6
<i>Wasting</i>	12,1	10,2	7,4	7,1	 0,6 7,7
<i>Underweight</i>	19,6	17,7	16,3	17,0	 0,1 17,1
<i>Overweight</i>	11,8	8,0	4,5	3,8	 0,3 3,5

Sumber : *Kemenkes.go.id*

Berdasarkan data diatas, prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan namun, angka tersebut masih tergolong sangat tinggi. Hal tersebut diperjelas dengan adanya data dari *badankebijakan.kemkes.go id*, yang menyatakan bahwa stunting menjadi masalah gizi terbesar di Indonesia saat ini. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Stunting

merupakan ancaman bangsa yang dapat berakibat pada daya saing nasional dan kualitas SDM. Anak-anak dengan stunting tidak hanya mengalami keterbatasan fisik seperti pertumbuhan yang lambat atau kerdil, mereka juga lebih rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan mereka yang lemah (Maesaroh et al., 2022). Stunting pada awal kehidupan anak dapat menyebabkan gangguan permanen pada perkembangan kognitif, intelektual, dan motorik. Oleh sebab itu, penanganan stunting yang tepat diperlukan agar dapat meminimalisir dampak terhadap pendapatan, pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, dan dapat menyebabkan ketimpangan dan peningkatan tingkat kemiskinan.

Grafik 1. 1 Tren Status Gizi Balita di Indonesia

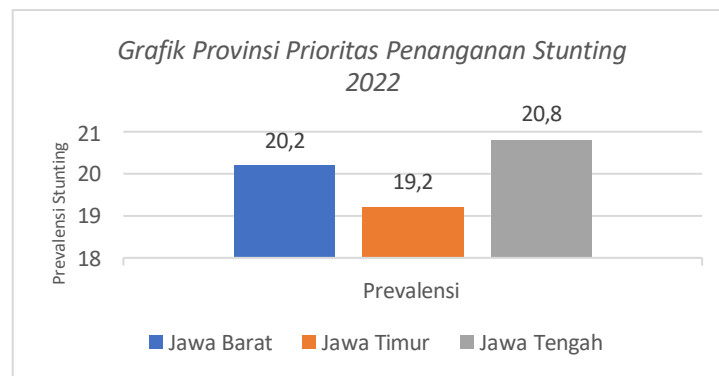


Sumber : *badankebijakan,kemkes,go.id*

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas, data menunjukkan prevalensi stunting berada di angka tertinggi yang mengindikasikan stunting

menjadi masalah gizi yang paling krusial di Indonesia. *World Health Organizations* (WHO) telah menetapkan standar prevalensi stunting harus berada dibawah 20%, sedangkan data diatas menunjukkan angka stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6% dimana belum mencapai standar yang telah ditetapkan oleh WHO.

Grafik 1. 2 Provinsi Prioritas Penanganan Stunting 2022



Sumber : Kemkes.go.id

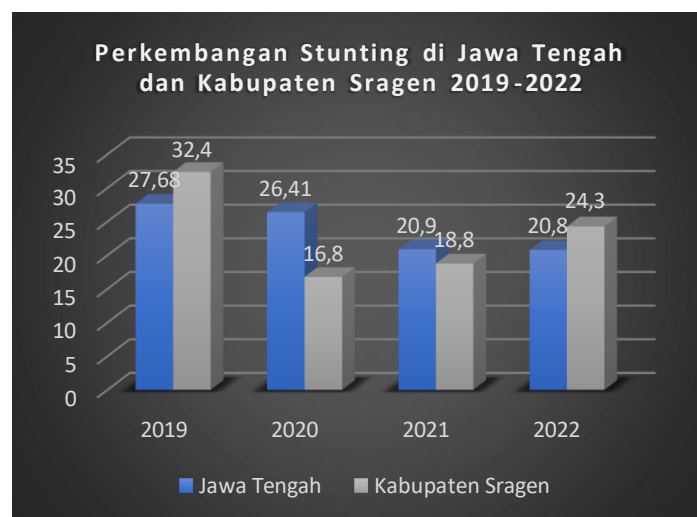
Berdasarkan data diatas, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan stunting nasional seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN yang menjelaskan bahwa Jawa Tengah menjadi prioritas penanganan stunting bukan disebabkan oleh tingginya angka stunting, melainkan karena provinsi ini memiliki populasi yang padat. Menurut data Dinkes Jawa Tengah tahun 2023, prevalensi stunting di provinsi ini mencapai 20,8%.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting pada tahun 2022 bahwa Kabupaten Sragen termasuk dalam daftar kabupaten/kota dengan fokus intervensi penurunan stunting (Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Sragen meningkat dari 18,8% di tahun 2021 menjadi 24,3% di tahun 2022 atau naik 5,5% dalam kurun waktu satu tahun dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah (20,8%) (Liza Munira & Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2022).

Grafik 1. 3 Perkembangan Stunting di Provinsi Jawa Tengah

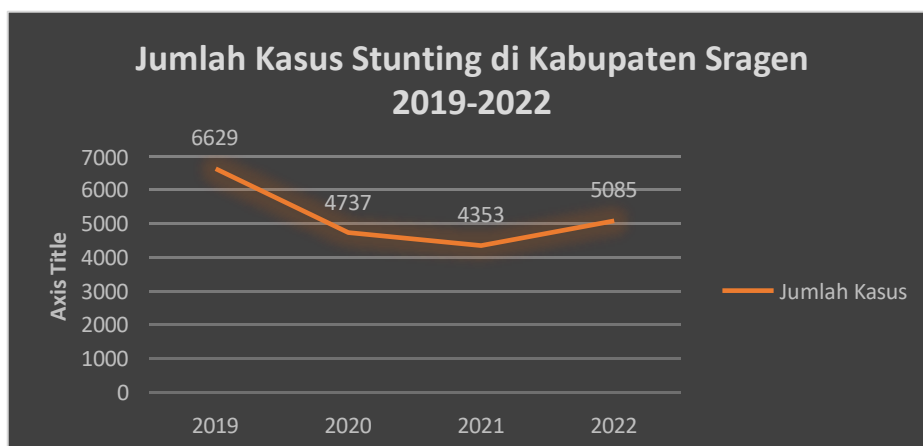


Sumber : *Survei Status Gizi Indonesia 2019-2022*

Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan menunjukkan penurunan prevalensi stunting yang stabil dari tahun 2019 hingga 2022,

dengan penurunan terbesar pada tahun 2020-2021. Kabupaten Sragen mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 (32,4%) ke tahun 2020 (16,8%), namun prevalensinya naik lagi pada tahun 2022 menjadi 24,3%. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan, yaitu adanya inkonsistensi dalam penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Sragen. Terjadi penurunan prevalensi stunting yang sangat signifikan di Kabupaten Sragen, dari 32,4% menjadi 16,8%. Kemudian, setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020, prevalensi stunting di Sragen kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 24,3%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional dan provinsi Jawa Tengah. Data ini menekankan bahwa Kabupaten Sragen menghadapi tantangan serius dalam penurunan stunting (*sragenkab.go.id*). Peningkatan kembali prevalensi stunting di Sragen pada tahun 2022 menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan hasil positif dari intervensi yang sebelumnya efektif.

Grafik 1. 4 Jumlah Kasus Stunting di Kabupaten Sragen 2019-2022



Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sragen 2019-2022

Berdasarkan data DP2KBP3A, pada tahun 2022, peningkatan kasus stunting di Kabupaten Sragen menjadi permasalahan krusial karena setelah tren penurunan yang terlihat pada 2020 dan 2021, jumlah kasus stunting justru naik kembali menjadi 5.085 balita. Merespon hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan upaya-upaya penanganan stunting terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Upaya yang dilakukan oleh DKK Sragen dalam menangani stunting adalah dengan melakukan dua intervensi yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif di wilayah Kabupaten Sragen.

Dilakukan upaya untuk memberikan zat besi pada remaja putri dan ibu hamil serta PMT pada balita. Pemantauan gizi untuk ibu hamil sampai ibu nifas dan PMT-nya memberikan vitamin A. Manfaat intervensi gizi spesifik untuk mencegah stunting hanya 30%, sedangkan 70% disebabkan oleh intervensi gizi sensitif lintas sektor. Sanitasi, sosial ekonomi, pendidikan, ketersediaan pangan, air bersih, program KB, dan program kesehatan lingkungan adalah beberapa dari banyak sektor yang terlibat dalam pekerjaan ini. Stunting telah diatasi dengan berbagai cara, seperti pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A dalam dosis tinggi, dan pemantauan pertumbuhan bayi dan balita secara teratur melalui kegiatan posyandu (Holifah and Yuliati, 2020).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Tablet Tambah Darah

(TTD), dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) merupakan komponen penting dalam penanganan stunting sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. *PMT* membantu memastikan asupan gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita, yang krusial untuk pertumbuhan optimal. *TTD* mencegah anemia pada remaja putri dan ibu hamil, mengurangi risiko melahirkan anak stunting. Sementara *MPASI* diberikan untuk bayi usia 6-24 bulan agar kebutuhan nutrisi penting terpenuhi setelah masa ASI eksklusif. Program ini penting karena fokusnya pada pencegahan malnutrisi sejak dini, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elsa Nafilatus Sholihah et al., 2024), status ekonomi berhubungan erat dengan kejadian stunting di Desa Jekani, Sragen. Pendapatan keluarga memengaruhi kemampuan memberikan gizi yang cukup kepada anak. Ketika pendapatan rendah, akses untuk membeli makanan berkualitas juga menurun, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kurangnya asupan gizi anak. Sebaliknya, jika penghasilan meningkat, kualitas makanan yang disediakan, terutama protein dan lauk pauk, juga akan lebih baik. Oleh karena itu, status sosial ekonomi keluarga masih sangat terkait dengan kejadian stunting di daerah tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mustofa et al., (2024) menyatakan bahwa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dilakukan oleh Puskesmas Sukodono, Sragen, belum menunjukkan

dampak yang signifikan terhadap anak-anak penderita stunting. Untuk memahami mengapa program ini belum memberikan hasil yang optimal, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hal ini penting agar penanganan stunting dapat mencapai hasil yang lebih sesuai dengan harapan dan meningkatkan kesehatan anak-anak yang terdampak. Kondisi serupa juga dialami oleh Susilo (2022) dalam pelaksanaan program PMT di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak-anak stunting, yang umumnya hanya mencapai SMA, serta kurangnya pengetahuan tentang pangan dan gizi yang tepat untuk anak. Sejalan dengan pernyataan Sutrisminah et al. (2023) dan Utami et al. (2023), pendidikan dan pengetahuan orang tua sangat memengaruhi pola makan anak. Selain itu, status ekonomi keluarga secara umum juga memainkan peran penting dalam menentukan status gizi anak (Patimah et al., 2022). Oleh karena itu, pengentasan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, di mana PMT perlu disertai dengan edukasi tentang gizi, pola asuh yang tepat, pola hidup sehat, serta upaya peningkatan ekonomi keluarga.

Disamping itu, pada penelitian Erna Widyawati et al., (2022), upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dalam menurunkan angka stunting masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah sikap kurang peduli dari masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan di puskesmas seperti ketiadaan USG dan dokter spesialis

kandungan atau anak, serta anggaran yang belum optimal. Akibatnya, program inovatif yang direncanakan hanya dapat diterapkan di wilayah Mondokan sebagai proyek percontohan, dan belum bisa diterapkan di seluruh wilayah Sragen.

Dilansir dari *sragen indoglobe news. id*, upaya penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sragen masih terus dilaksanakan oleh beberapa stakeholder terkait salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen meskipun prevalensi stunting wilayah tersebut masih tinggi yang mengindikasikan bahwa program penanganan stunting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen belum berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Penanganan Stunting di Kabupaten Sragen”. Selain itu, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan yaitu “Mengapa prevalensi stunting di Kabupaten Sragen masih tinggi? ?”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul, yaitu :

1. Program penanganan stunting di Kabupaten Sragen belum terlaksana dengan optimal
2. Stakeholder penanganan stunting di Kabupaten Sragen belum melaksanakan tugasnya dengan optimal
3. Tren kenaikan prevalensi stunting masih tergolong tinggi di Kabupaten Sragen

4. Tren kenaikan prevalensi stunting di Kabupaten Sragen masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah
5. Intervensi program penanganan stunting belum optimal
6. Jumlah stunting di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program penanganan stunting di Kabupaten Sragen ?
2. Faktor apa terkait dengan program penanganan stunting di Kabupaten Sragen ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan program penanganan stunting di Kabupaten Sragen.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor terkait program penanganan stunting di Kabupaten Sragen.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai bentuk evaluasi terhadap program penanganan stunting.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang hendak melakukan penelitian terkait penanganan stunting.
- c. Penelitian diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian baru yang dapat mendukung penanganan stunting secara optimal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Terhadap Peneliti

Diharapkan studi ini dapat memperdalam wawasan peneliti serta menyumbang pengetahuan empirik dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa administrasi publik di lingkup penanganan stunting.

b. Kegunaan Terhadap Masyarakat

Diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pemberian gizi, pola pengasuhan, serta keberlangsungan hidup yang layak bagi anak sehingga jumlah stunting semakin menurun

c. Kegunaan Terhadap Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi pemerintah dalam optimalisasi evaluasi program serta bentuk-bentuk evaluasi program yang tepat dan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Judul/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Arrasyidin Diva Afrizal & Isnaini Rodiyah/2023/Implementasi Program Literasi Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Desa Tambak Kalisogo/Jurnal Ilmu Administrasi Public	Tujuan penelitian adalah untuk menemukan solusi terkait pencegahan stunting dengan melibatkan masyarakat	Teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle, mencakup : Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>) dan Lingkungan Kebijakan (<i>Content of Implementation</i>)	Kualitatif	Masyarakat Desa Tambak Kalisogo sudah berangsur-angsur sadar akan pentingnya penanganan stunting dan juga dalam pencegahannya sudah bisa diterapkan dengan baik.
	Arrasyidin Diva Afrizal & Isnaini Rodiyah/2023/Implementation of Health Literacy Program in Handling Stunting in Tambak Kalisogo	The aim of the research is to find solutions for preventing stunting by involving the community.	Implementation Theory according to Merilee S. Grindle, includes: Policy Content and Policy Environment	Qualitative	The Tambak Kalisogo Village community has gradually become aware of the importance of handling stunting and how its prevention can be implemented

	Village/Journal of Public Administration Science				well.
2.	Julia Eka Putri/2023 /Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama (GESIT GEMBIR A) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo/ Jurnal Publika	Tujuan penelitian adalah mempercepat program penurunan stunting terhadap balita di Kabupaten Situbondo	Teori Implementasi menurut Quade, mencakup : kebijakan yang diimpikan, kelompok target, organisasi yang melaksanakan, dan faktor lingkungan	Kualitatif	Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal
	Julia Eka Putri/2023 /Implementation of the Joint Food Sharing Movement Nutrition Recovery House Program	The aim of the research is to accelerate the program to reduce stunting in toddlers in Situbondo Regency.	Implementation Theory according to Quade, includes: the policy that is dreamed of, the target group, the implementing organization, and environmental factors.	Qualitative	Acceleration of stunting reduction at the Situbondo District Health Office is running well and is being implemented optimally

	(GESIT GEMBIR A) in Accelerating Stunting Reduction at the Situbondo Regency Health Office/Publica Journal				
3.	Yuanda Kholifah Saputriani/ 2023/Implementasi Program BKB III Melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Guna Mendukung Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Studi di Kecamatan Sukolilo)/Jurnal SARAQ OPAT	Tujuan penelitian adalah mempercepat penurunan stunting melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB III)	Teori George Edward III, mencakup : Komunikasi, Struktur, Sumber Daya, dan Disposisi.	Kualitatif	Bina Keluarga Balita melalui program SOTH di Kecamatan Sukolilo telah optimal dilaksanakan dengan bukti penurunan jumlah balita stunting di Kecamatan Sukolilo
	Yuanda Kholifah	The aim of the	George Edward III's theory	Qualitative	Toddler Family Development

	Saputriani/2023/Implementation of the BKB III Program Through the Great Parents School (SOTH) to Support the Reduction of Stunting in the City of Surabaya (Study in Sukolilo District)/S ARAQ OPAT Journal	research is to accelerate the reduction of stunting through integrative holistic toddler family development (BKB III).	includes: Communication, Structure, Resources, and Disposition.		through the SOTH program in Sukolilo District has been optimally implemented, with evidence of a decrease in the number of stunted toddlers in Sukolilo District
4.	Farida Hani Sri Wahyuni, Rumzi Samin, Rudi Sabiyakto, dan Fitri Kurnianingsih/2023/Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian	Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis terhadap implementasi program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Teori Implementasi menurut Soren C. Winter, mencakup : Perilaku organisasi dan antar organisasi, Perilaku birokrasi level bawah, dan Perilaku kelompok sasaran	Kualitatif	Implementasi program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sudah berjalan maksimal.

	Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang/Jurnal Relasi Publik Farida Hani Sri Wahyuni, Rumzi Samin, Rudi Sabiyakto, and Fitri Kurnianingsih/2023/Implementation of the Stunting Prevention Program at the Population Control and Family Planning Health Service of Tanjungpinang City/Public Relations Journal	Berencana Kota Tanjungpinang The purpose of this study was to analyze the implementation of the stunting control program at the Health, Population Control, and Family Planning Office of Tanjungpinang City.	Implementation Theory according to Soren C. Winter, includes: Organizational and inter-organizational behavior, Lower-level bureaucratic behavior, and Target group behavior	Qualitative	The implementation of the stunting control program at the Tanjungpinang City Health Office has been running optimally
5.	Agus Bahrudin/2024/Analisis Implementasi	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui	Teori George Edward III, mencakup : Komunikasi, Struktur, Sumber	Kualitatif	Program ini berhasil membangun komunikasi efektif dengan

	asi Program Rumah Desa Sehat Dalam Penurunan Angka Stunting/Jurnal MIMBAR ADMINIS TRASI Agus Bahrudin/2024/Analysis of the Implementation of the Healthy Village House Program in Reducing Stunting Rates/Journal of MIMBAR ADMINIS TRASI	i pelaksanaa n keempat faktor implement asi Program Rumah Desa Sehat Dalam Penurunan Angka Stunting The purpose of this study was to determine the implementation of the four factors of the Healthy Village House Program in reducing stunting rates.	Daya, dan Disposisi. George Edward III's theory includes: Communication, Structure, Resources, and Disposition.	Qualitative	melibatkan masyarakat melalui Rumah Desa Sehat) sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat This program has succeeded in building effective communication by involving the community through the Healthy Village House (Rumah Desa Sehat) as a Community Learning Center.
6.	Regina Maulidya Putri Purwanto, Yustanti Aprinda Farhana, Ario Dewandaru, dan	Tujuan penelitian adalah untuk membantu menekan angka <i>stunting</i> melalui Program	Teori George Edward III, mencakup : Komunikasi, Struktur, Sumber Daya, dan Disposisi.	Kualitatif	Kebijakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) mampu menurunkan angka stunting di wilayah

	Indira Arundinasari/2023/Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Kegiatan Posyandu Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Sumberbeno, Kabupaten Probolinggo/Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Kegiatan Posyandu			Kecamatan Sumberasih
	Regina Maulidya Putri Purwanto, Yustanti Aprinda Farhana, Ario Dewandaru, and Indira Arundinasari/2023/Implementation of the Supplementary	The aim of the research is to help reduce stunting rates through the Supplementary Feeding Program (PMT) and Posyandu Activities.	George Edward III's theory includes: Communication, Structure, Resources, and Disposition.	Qualitative	The Supplementary Feeding (PMT) program policy is able to reduce stunting rates in the Sumberasih District area.

	Feeding Program (PMT) and Integrated Health Post Activities as an Effort to Reduce Stunting Rates in Sumberbe ndo Village, Probolinggo Regency/Scientific Journal of Wahana Pendidikan				
7.	Mesy Salanli, Dwiki Adi Putra, dan Sanny Nofrima/2024/Implementasi Program “OReO PACK” Dalam Mengurangi <i>Stunting</i> (Studi Kasus Kecamatan Sukarmi Kota Palembang)/The	Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana program “OReO PACK” di kecamatan Sukarmi Kota Palembang dalam mengukur	Teori George Edward III, mencakup : Komunikasi, Struktur, Sumber Daya, dan Disposisi.	Kualitatif	Program “OReO PACK” dalam menangani Stunting di Kecamatan Sukarmi Palembang sudah berjalan dengan baik

	Journalist : Social and Government Mesy Salanli, Dwiki Adi Putra, and Sanny Nofrima/2024/Implementation of the “OReO PACK” Program in Reducing Stunting (Case Study of Sukarmi District, Palembang City)/The Journalist: Social and Government	gi Stunting. The purpose of the study was to gain a deeper understanding of how the “OReO PACK” program in Sukarami District, Palembang City, reduces stunting.	George Edward III's theory includes: Communication, Structure, Resources, and Disposition.	Qualitative	The “OReO PACK” program in handling Stunting in Sukarami District, Palembang has been running well
8.	Indra Fajar Swasana & Priyanto/2024/Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting di	Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program <i>stunting</i> yang angkanya di Kota Surabaya	Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn, mencakup : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi	Kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program <i>stunting</i> sudah berjalan dengan baik

	Kota Surabaya/Jurnal SMIA Indra Fajar Swasana & Priyanto/2024/Implementation of the Policy for the Community Nutrition Improvement Program for Toddlers with Stunting Status in Surabaya City/SMIA Journal	The aim of the study was to analyze the implementation of the stunting program in the city of Surabaya.	Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik The Implementation Theory of Van Meter and Van Horn includes: policy standards and targets; resources; characteristics of implementing organizations; communication between related organizations and implementation activities; and social, economic, and political environments.	Qualitative	The results of the study show that the stunting program is running well.
9.	Vista Afdira & Pivit Septiary Chandra/2023/Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunk	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program PEPES dan apa saja faktor penghamb	Teori Charles O. Jones, mencakup : Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program PEPES belum maksimal karena ada beberapa kendala yang ditemukan terkait belum adanya aturan dalam

	an Angka Stunting di Kecamatan Bagan Sinembah Raya/ Jurnal Administrasi Karya Dharma Vista Afdira & Pivit Septiary Chandra/2023/Implementation of the Stunting Reduction Acceleration Program (PEPES) in Reducing Stunting Rates in Bagan Sinembah Raya District/ Karya Dharma Administration Journal	at dalam pelaksanaannya The purpose of this study is to find out how the PEPES program is implemented and what are the inhibiting factors in its implementation.	Charles O. Jones' theory includes: Organization, Interpretation, and Application	Qualitative	pelaksanaan program, dll. The results of this study indicate that the implementation of the PEPES program has not been optimal because several obstacles were found related to the absence of regulations in implementing the program, etc.
10.	Ghina Ghumati Auliyah, Bela Puji Utami,	Tujuan penelitian adalah untuk menganali	Teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle, mencakup : Isi	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program penurunan

	Qhori Anantama, Reyhan Ramadhan Herdiansyah, Robby Wirayudha Pratama, Muhammad Biaggi, dan Noer Apptika Fujilestari/2024/Implementasi Program Keberhasilan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Angka Stunting di Kota Cimahi/Journal of Social and Economics Research	sis sejauh mana Implementasi Program Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Angka Stunting di Kota Cimahi.	Kebijakan (<i>Content of Policy</i>) dan Lingkungan Kebijakan (<i>Content of Implementation</i>)		stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan berjalan dengan baik dan signifikan
	Ghina Ghumati Auliyah, Bela Puji Utami, Qhori Anantama, Reyhan Ramadhan Herdiansyah, Robby	The purpose of the study was to analyze the extent to which the implementation of the Health Service's	Implementation Theory according to Merilee S. Grindle, includes: Policy Content and Policy Environment	Qualitative	The results of this study show that the stunting reduction program carried out by the Cimahi City Government through the

	Wirayudha Pratama, Muhammad Biaggi, and Noer Apptika Fujilestari/2024/Implementation of the Program for the Success of the Health Service's Strategic Plan in Reducing Stunting Rates in Cimahi City/Journal of Social and Economics Research	Strategic Plan (Renstra) Success Program reduced stunting rates in Cimahi City.			Health Service Strategic Plan (Renstra) is running well and significantly.
--	---	---	--	--	--

Penelitian penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Arrasyidin Diva Afrizal dan Isnaini Rodiyah. Judul penelitian yang diangkat adalah *Implementasi Program Literasi Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Desa Tambak Kalisogo*. Penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada penelitian kualitatif dengan hasil akhir yang menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Tambak Kalisogo sudah berangsur-angsur sadar akan pentingnya penanganan stunting dan juga dalam pencegahannya sudah bisa diterapkan dengan baik.

Penelitian penulis juga merujuk pada penelitian yang dilakukan

oleh Julia Eka Putri. Judul penelitian yang diangkat adalah *Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama (GESIT GEMBIRA) dalam*

Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada pendekatan kualitatif. Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal, namun terdapat beberapa salah satunya belum terjangkaunya sasaran yang berada di beberapa wilayah yang jauh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuanda Kholifah Saputriani. Judul yang diangkat adalah *Implementasi Program BKB III Melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) Guna Mendukung Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Studi di Kecamatan Sukolilo)*. Penelitian yang dilakukan dengan berlandaskan pada pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bina Keluarga Balita melalui program SOTH di Kecamatan Sukolilo telah optimal dilaksanakan dengan bukti penurunan jumlah balita stunting di Kecamatan Sukolilo.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida Hani Sri Wahyuni, Rumzi Samin, Rudi Sabiyakto, dan Fitri Kurnianingsih juga rujukan penelitian penulis. Judul yang diangkat adalah *Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk,*

dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sudah berjalan maksimal.

Selanjutnya, penelitian penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Bahrudin. Judul penelitian yang diangkat adalah Analisis Implementasi

Program Rumah Desa Sehat Dalam Penurunan Angka Stunting. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil membangun komunikasi efektif dengan melibatkan masyarakat melalui Rumah Desa Sehat) sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat.

Penelitian penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Regina Maulidya Putri Purwanto, Yustanti Aprinda Farhana, Ario Dewandaru, dan Indira Arundinasari. Judul yang diangkat adalah Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Kegiatan Posyandu Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Sumberbendo, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) mampu menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Sumberasih.

Penelitian yang dilakukan oleh Mesy Salanli, Dwiki Adi Putra,

dan Sanny Nofrima juga menjadi rujukan penelitian penulis. Judul penelitian yang diangkat adalah Implementasi Program “OReO PACK” Dalam Mengurangi *Stunting* (Studi Kasus Kecamatan Sukarmi Kota Palembang). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa Program “OReO PACK” dalam menangani *Stunting* di Kecamatan Sukarami Palembang sudah berjalan dengan baik.

Penelitian penulis juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Fajar Swasana dan Priyanto. Judul penelitian yang diangkat adalah Implementasi Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus *Stunting* di Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa program *stunting* sudah berjalan dengan baik. Penelitian selanjutnya yang menjadi rujukan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Vista Afdira & Pivit Septiary Chandra. Judul penelitian yang diangkat adalah Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PEPES) Dalam Menurunkan Angka *Stunting* di Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PEPES belum maksimal karena ada beberapa kendala yang ditemukan terkait belum adanya aturan dalam pelaksanaan program, dll.

Selain itu, penelitian penulis juga merujuk pada penelitian yang

dilakukan oleh Ghina Ghumati Auliyah, Bela Puji Utami, Qhori Anantama, Reyhan Ramadhan Herdiansyah, Robby Wirayudha Pratama, Muhammad Biaggi, dan Noer Apptika Fujilestari. Judul penelitian yang diangkat adalah Implementasi Program Keberhasilan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Angka *Stunting* di Kota Cimahi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Akhir dari penelitian menunjukkan bahwa program penurunan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan berjalan dengan baik dan signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terkait dengan implementasi program penurunan stunting pada wilayah tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus dan lokus yang hendak dikaji untuk mengetahui keberjalanan implementasi program penanganan *stunting* di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

1.6.2 Administrasi Publik

Ilmu Administrasi publik atau administrasi negara menjadi salah satu keilmuan krusial apalagi sejak dipakai sebagai disiplin ilmu seperti yang dipelopori oleh Woodrow Wilson (1887) yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 1913-1921 dengan menulis sebuah artikel ilmiah berjudul “The Study of Administration” sesuai yang termuat dalam jurnal *Political Science Quarterly*.

Sementara itu, administrasi publik menurut E.H. Litcfiled adalah

studi tentang bagaimana berbagai lembaga pemerintah disusun, dilengkapi, dan diawasi (Dr. H. Amin Ibrahim: 2007). Segala upaya pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk kegiatan manajemen pemerintah, dengan dukungan sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pemerintahan oleh suatu negara memerlukan adanya ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik karena dapat dianggap sebagai proses politik dan berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, penyelenggaraan negara mencakup masalah bukan hanya administrasi tetapi juga politik. Menurut Mc Curdy (1986), itu disebut sebagai "birokrasi". Namun, menurut Paolong, administrasi publik secara konseptual bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan publik, meningkatkan respons kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan menciptakan praktik manajemen sehingga pemerintah terbiasa melakukan tugas secara efektif, efisien, dan rasional. Dengan kata lain, administrasi publik tidak hanya mencakup masalah administrasi, tetapi juga banyak aspek kebutuhan kebijakan suatu lembaga publik, seperti negara (Pasolong : 2017).

Administrasi publik merupakan segala hal yang dilakukan pemerintah terutama badan eksekutif ketika menyelesaikan masalah baik masalah sosial atau publik dengan cara birokrasi (Felix A. Nirgo dan L.

Loyd G. Nirgo, 1970:21). Felix A. Nirgo menyatakan bahwa administrasi publik tersusun atas empat jenis tindakan yakni, usaha kelompok di dalam pemerintahan, memiliki tiga cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), terdapat peran krusial dalam perumusan kebijakan publik, memiliki perbedaan yang signifikan dengan sektor swasta, dan menutup kontak terhadap kelompok lain.

Oleh sebab itu, administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses penyelenggaraan urusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi segala sesuatu yang diperlukan masyarakat serta menemukan alternatif atau solusi untuk memecahkan masalah.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Sejumlah paradigma telah muncul sebagai hasil dari evolusi bidang ilmu administrasi publik. Paradigma-paradigma ini menunjukkan bagaimana tujuan, teori, metodologi, dan nilai yang mendasarinya telah berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan para sarjana administrasi publik mengenal banyak paradigma "klasik", termasuk yang diciptakan oleh Nicholas Henry dan George Frederickson.

Nicholas Henry, George Frederickson, dan Mustopadidjaja mengembangkan pemikiran administrasi publik, yang dipaparkan secara lebih rinci sesuai dengan tujuan utama penulisan makalah ini. Untuk membuatnya lebih mudah dipahami, Uraian ini akan dibatasi pada beberapa bagian utama sistem paradigma: lokus penelitian dan

fokus, yang disebutkan oleh Golembiewski (1977:27-37) dan teori yang mendukung setiap paradigma.

Berikut paradigma-paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry :

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1990-1926)

Paradigma dikotomi politik-administrasi adalah pendekatan yang digunakan untuk membedakan urusan administrasi dan kepentingan politik dalam fungsi utama pemerintahan. Ilmu politik dalam paradigma ini hanya melingkupi masalah politik itu sendiri, tata kelola, dan kebijakan. Sementara itu substansi ilmu administrasi mencakup organisasi, kepegawaian, dan penganggaran sistem birokrasi pemerintah. Lembaga legislatif dan yudikatif termasuk dalam lokus politik, yang memiliki tanggung jawab utama untuk membuat kebijakan atau mewujudkan keinginan negara. Sebaliknya, lokus administrasi terdiri dari badan eksekutif dan tanggung jawabnya terkait dengan implementasi kebijakan (Goodnow, 1900:10-11).

Ilmuwan lain yang termasuk ke dalam paradigma ini yaitu Frank Goodnow, Dwight Waldo hingga Woodrow Wilson.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Administrasi publik memiliki lokus yang saat ini kurang mendapatkan perhatian. Namun, fokus utama adalah "asas"

manajemen yang dianggap berlaku untuk setiap jenis lingkungan budaya dan organisasi. Administrasi publik pada tahun 1940-an tidak setuju bahwa pemerintahan dan politik harus terpisah. Yang lainnya adalah bahwa prinsip administrasi tidak logis. Ada dua pilar administrasi yang ditetapkan oleh para intelektual kreatif di lapangan pada Abad Pertengahan: dikotomi antara administrasi publik dan politik serta prinsip administrasi. Administrasi publik dari berbagai identitas epistemologi menjadi tidak jelas karena ketidakhadiran ini. Identitas belum ditemukan, menurut beberapa orang. Hubungan teoritis antara ilmu politik dan administrasi publik dapat dilihat dalam pembuatan kebijakan publik. Selama proses ini, administrasi publik menentukan apa yang termasuk dalam "kotak hitam", yaitu bagaimana kebijakan publik dibuat dalam birokrasi publik dan hubungannya dengan politik.

Pendiri paradigma ini juga termasuk Willoughby, Henry Fayol, dan Parker Follet.

3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Upaya untuk menciptakan kembali hubungan antara ilmu politik dan administrasi publik adalah tujuan dari fase ketiga. Namun, hasil dari usaha ini bertujuan untuk menjelaskan bidang administrasi publik sebagai keahlian yang penting,

setidaknya dalam hal fokus analisis.

Tokoh lain yang termasuk paradigma ini antara lain Dwight Waldo, Robert Dahl, Frederick Mosher, dll.

4. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu yang mempelajari administrasi publik artinya mereka juga belajar tentang psikologi sosial dan analisis sistem. Pengetahuan administrasi bukan hanya pedoman-pedoman yang sifatnya universal yang universal, tetapi mereka berpendapat bahwa metodologi organisasi dan manajemen yang berbeda memiliki ciri khas, bentuk, dan gangguan tertentu. Fokus teori organisasi dan manajemen yang dianggap kurang mendukung dalam politik, penelitian ini hanya dilakukan dalam domain ilmu administrasi.

Herbert Simon, James March, dan Keith Henderson adalah beberapa ilmuwan yang menganut paradigma ini.

5. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970-)

Terdapat sedikit sisi positif dalam menentukan lokus untuk area ini, serta kepentingan publik dan "resep kebijakan publik" yang tentu dimasukkan. Namun, bidang ini tampaknya tidak menekankan betapa uniknya komponen sosial tertentu yang diperlukan untuk mengembangkan negara sebagai lokus yang ideal. Administrator publik mungkin menganggap

fenomena ini agak sewenang-wenang. Namun, kesamaan dari fenomena ini adalah bahwa mereka membutuhkan pemahaman lintas disiplin, kemampuan untuk menggabungkan ide-ide, dan fokus pada topik yang mendeskripsikan bagaimana kehidupan di perkotaan, hubungan yang bersifat administratif antara organisasi, dan hubungan antara teknologi serta moralitas, atau urusan publik. Paradigma baru administrasi publik belum muncul sejak tahun 1970.

Berbagai ilmuwan seperti Charles Lindbloom, Gerald Caiden, Louis Gawthrop, dan D.H. Rosenbloom termasuk dalam paradigma ini.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang dalam rangka menangani permasalahan yang mempengaruhi kepentingan umum. Dalam pandangan Thomas R. Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Sementara itu, David Easton menguraikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat."

Sementara itu, menurut Hogwood dan Gunn (2018), kebijakan publik merujuk pada serangkaian tujuan, tindakan, serta instrumen yang dirumuskan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi

dan mengarahkan perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Mereka menekankan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang bersifat dinamis, yang melibatkan tahap-tahap perumusan kebijakan, implementasi oleh aparat birokrasi, serta evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Proses ini menggambarkan hubungan kompleks antara kebijakan yang dirancang dan realitas sosial yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Disamping itu, Anderson (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait dengan kepentingan publik. Menurutnya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang kompleks, di mana berbagai aktor terlibat, termasuk pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat luas. Kebijakan ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk keputusan formal atau peraturan tertulis, tetapi juga mencakup kebijakan informal atau tidak tertulis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai keputusan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan permasalahan publik melalui tindakan kolektif. Kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor, dan mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, serta politik dalam suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan publik

berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengatur perilaku masyarakat serta mencapai kesejahteraan bersama.

1.6.5 Manajemen Publik

Ferlie dan rekan-rekannya dalam karya *The New Public Management in Action* mendefinisikan manajemen publik sebagai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas dalam sektor publik. Mereka mengaitkan manajemen publik dengan penerapan prinsip-prinsip inovasi, efisiensi, serta adopsi mekanisme pasar dalam penyediaan layanan publik. Ferlie menekankan bahwa manajemen memiliki peran penting dalam memandu dan mengarahkan transformasi di sektor publik, terutama dalam konteks tantangan globalisasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang lebih responsif dan adaptif.

Sementara itu, Hughes mendefinisikan manajemen publik sebagai suatu proses yang mencakup pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kinerja organisasi publik. Dalam konteks manajemen publik, peran birokrasi dan pejabat publik menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah diimplementasikan secara efektif dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Selain itu, Hughes juga menekankan signifikansi akuntabilitas dalam menjaga transparansi serta tanggung jawab lembaga pemerintah terhadap publik,

yang merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari berbagai perspektif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik mencakup serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas di sektor publik. Fokus utama dari manajemen publik adalah peningkatan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, politik, dan nilai-nilai demokrasi. Pendekatan manajemen publik modern juga menekankan pentingnya inovasi serta penerapan prinsip-prinsip yang biasa digunakan di sektor swasta, yang disesuaikan dengan konteks pelayanan publik, demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.

1.6.6 Implementasi

1.6.6.1 Definisi Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavsky (1973), implementasi adalah proses yang rumit, di mana kebijakan diubah menjadi rangkaian tindakan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Mereka menekankan bahwa koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Sementara itu menurut Grindle, implementasi merupakan fase di mana keputusan politik atau kebijakan diterjemahkan menjadi program operasional yang bertujuan menghasilkan hasil

yang diinginkan. Proses ini melibatkan pengalokasian sumber daya serta cara para pelaksana mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaannya.

Dalam konteks program atau kebijakan, implementasi program merujuk pada proses penerapan atau eksekusi dari kebijakan atau program yang sudah direncanakan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Implementasi mencakup berbagai langkah yang diambil untuk mengalokasikan sumber daya dan komitmen demi menghasilkan output yang nyata.

1.6.6.2 Pengertian Program

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : *Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.*

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9), definisi program mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan dapat menghasilkan hasil atau

dampak tertentu.

Sementara itu, William Dunn (1994) mendefinisikan program sebagai kegiatan atau proyek yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menghasilkan hasil tertentu yang sesuai dengan kebijakan publik yang ada. Program biasanya merupakan hasil dari keputusan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah publik.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa program adalah kumpulan kegiatan atau proyek yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Program umumnya disusun secara sistematis dan bertujuan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu dalam konteks kebijakan publik atau organisasi. Program mencakup pengalokasian sumber daya, langkah-langkah yang terencana, serta penilaian untuk mengukur efektivitas dan dampaknya.

1.6.7 Konsep Implementasi Program

1.6.7.1 Definisi Implementasi Program

Dalam bukunya *"Implementing Public Policy,"* Hill dan Hupe menyatakan bahwa *"Implementation is the process of putting a decision or plan into effect; it involves the execution of policy as intended by the policy-makers."*

Ini menekankan bahwa implementasi adalah proses mengeksekusi kebijakan sesuai dengan maksud pembuat

kebijakan.

Sementara itu, Jones memberikan definisi implementasi program yang masih bersifat umum. Sejumlah langkah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan program dapat dipahami sebagai implementasi program itu sendiri. Lebih lanjut, Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28) menekankan bahwa terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu:

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi program bukan sekedar upaya untuk mencapai tujuan. Proses ini harus terorganisir secara struktural, manajerial, prosedural, dan aplikatif agar tujuan yang ingin dicapai dapat berlangsung dengan baik dan terarah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah suatu tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu sebagai langkah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang diinginkan.

1.6.8 Model Implementasi Program

Model implementasi program merujuk pada suatu kerangka kerja atau pendekatan yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola suatu program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model ini mencakup serangkaian langkah, strategi, metode, dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

1.6.8.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model implementasi klasik dicetuskan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 yang mengindikasikan implementasi kebijakan berjalan lurus Berikut 6 variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn :

1. Sasaran kebijakan dan standarnya

Adalah upaya agar terhindar dari interpretasi yang sifatnya menyebabkan konflik antar agen pelaksana. Selain itu, harus dipastikan bahwa aspek ini menuntut kejelasan dan dapat diukur.

2. Sumber daya

Variabel ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang sifatnya dapat mendukung kebijakan.

3. Komunikasi

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, komunikasi sangat penting dalam memperlancar koordinasi dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana artinya agen pelaksana harus dapat membantu atau menghalangi pelaksanaan kebijakan.

5. Disposisi implementor

Tiga komponen membentuk disposisi implementor: respons implementor terhadap kebijakan dan kognisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan serta disposisi aktor dari implementasi.

6. Keadaan sosial, ekonomi, dan politik

Meliputi sumber daya yang terdapat pada lokasi atau

wilayah yang dapat mempercepat akan pencapaian
keberhasilan penerapannya

1.6.8.2 Model Implementasi Matland

Model implementasi Matland memiliki beberapa variabel
keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut :

1. Ketepatan kebijakan

Kesesuaian kebijakan dengan masalah yang akan diselesaikan dan memastikan bahwa lembaga pelaksana kebijakan sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan dikenal sebagai ketepatan kebijakan.

2. Ketepatan pelaksanaan

Artinya mengacu pada ketepatan para stakeholder yang terlibat dalam di pelaksanaan kebijakan, yang mencakup pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat.

3. Ketepatan target

Variabel ini cenderung memperhatikan tiga hal penting dalam menentukan target seperti ketepatan target terhadap rencana, intervensi, dan pengaruh terhadap kebijakan.

4. Ketepatan lingkungan

Ketepatan lingkungan mencakup lingkungan terkait kebijakan, yang merupakan bentuk interaksi dilakukan oleh lembaga perumus kebijakan dan instansi pelaksana kebijakan yang relevan, serta kondisi eksternal yang tersusun atas persepsi publik dan lembaga interpretasi.

1.6.8.3 Model Implementasi Merille S. Grindle

Model implementasi selanjutnya diungkapkan oleh Grindle yang menyatakan bahwa model kebijakan sebagai proses politik dan administrasi. Model ini memaparkan proses perumusan kebijakan oleh para pemangku kebijakan, di mana output program ditentukan oleh materi program dan interaksi para perumus kebijakan. Berikut adalah beberapa variabel yang termasuk dalam model ini :

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan ini terdiri atas keinginan pihak sasaran, jenis dan manfaat, tingkat perubahan yang terjadi, lokus perumusan keputusan, pelaksanaan program hingga sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses kebijakan.

2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi terdiri dari aspek-aspek seperti kekuasaan lembaga, penguasa, aktor hingga kepatuhan dan daya tanggap dalam komponen lingkungan implementasi.

1.6.8.4 Model Implementasi Quade

Model Implementasi Quade merupakan salah satu pendekatan dalam analisis kebijakan publik yang dirumuskan oleh Edward S. Quade, seorang ahli dalam analisis sistem. Quade menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan secara efektif dengan menggunakan pendekatan rasional dan terstruktur, serta menegaskan pentingnya pengambilan keputusan yang logis dan

didukung oleh data dalam proses implementasi kebijakan publik.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan Model Quade, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Kejelasan Tujuan Kebijakan

Seberapa jelas tujuan kebijakan yang diambil? Apakah tujuan tersebut dapat diukur dan realistis? Kejelasan tujuan ini penting untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.

2. Ketersediaan dan Validitas Data

Apakah data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan akurat dan relevan? Data yang valid dan berkualitas menjadi indikator kunci dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

3. Analisis Rasionalitas dan Alternatif

Sejauh mana berbagai alternatif kebijakan telah dianalisis secara rasional dan dibandingkan? Indikator ini meliputi evaluasi terhadap risiko, manfaat, dan biaya dari setiap alternatif.

4. Efektivitas Pengambilan Keputusan

Seberapa baik keputusan yang diambil dalam memecahkan masalah yang diidentifikasi? Keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang rasional adalah salah satu indikator utama dari model ini.

5. Proses Implementasi yang Sistematis

Apakah implementasi kebijakan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan perencanaan? Implementasi yang baik harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dirancang dengan jelas.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Apakah ada sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan selama proses implementasi? Indikator ini memastikan kebijakan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan di lapangan atau kegagalan dalam implementasi awal.

7. Dampak dan Hasil Kebijakan

Sejauh mana kebijakan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Indikator ini melihat outcome kebijakan, apakah berhasil menyelesaikan masalah atau menimbulkan efek yang diinginkan sesuai dengan analisis awal.

1.6.8.5 Model Implementasi menurut Soren C. Winter

Søren C. Winter merupakan seorang akademisi yang mengkhususkan diri dalam studi implementasi kebijakan publik. Dalam teorinya, ia mengajukan sebuah pendekatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat praktis, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Model

implementasi yang dikembangkan oleh Søren C. Winter dikenal sebagai Model Implementasi Terintegrasi, yang menitikberatkan pada tiga elemen utama dalam penerapan kebijakan, antara lain :

1. Konteks Kebijakan (Policy Design)

Hal ini meliputi sasaran kebijakan, alat-alat kebijakan, serta regulasi dan prosedur yang dirumuskan oleh para perancang kebijakan. Perancangan kebijakan yang transparan dan realistis sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesepakatan dari para pelaksana terhadap kebijakan tersebut juga menjadi faktor penting.

2. Kapasitas Organisasi dan Kinerja Pelaksana (Implementation Process)

Aspek ini menyoroti kapasitas organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, mencakup sumber daya manusia, keuangan, serta kemampuan teknis. Kapasitas pelaksana dan tingkat keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan juga berpengaruh terhadap cara kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

3. Respons Masyarakat (Street-level Bureaucrats)

Pihak yang menerima kebijakan, atau mereka yang terdampak oleh kebijakan tersebut, mencakup respons dari masyarakat serta cara birokrat di tingkat bawah (street-level bureaucrats) menjalankan tugas mereka. Interaksi antara

birokrat dan masyarakat, serta bagaimana birokrat menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dalam penerapan sehari-hari, memiliki peran yang sangat penting.

1.6.9 Program Penanganan Stunting

Program penanganan stunting adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting pada balita dan anak-anak. Berikut beberapa bentuk intervensi Kementerian Kesehatan dalam penanganan stunting :

1.6.9.1 Program Pemberian Makan Tambahan (PMT)

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 menetapkan PMT berbahan pangan lokal sebagai salah satu inisiatif untuk mempercepat penurunan stunting. Ini bertujuan untuk mendukung indikator ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi. Ibu hamil juga menerima PMT yang terbuat dari bahan pangan lokal ini. Jadi, stunting banyak terjadi bukan saat bayi lahir, tetapi pada saat ibu hamil dan remaja yang mengalami KEK, di mana tablet tambah darah diberikan kepada ibu remaja.

Dr. Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Masyarakat, menjelaskan bahwa PMT berbahan pangan lokal adalah langkah penting untuk mencegah stunting. Dirjen Maria juga menyatakan bahwa PMT yang terbuat dari bahan pangan lokal bertujuan untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan Balita.

Diharapkan dari PMT ini terjadi penambahan berat badan ibu hamil yang sesuai dengan usia kehamilannya, perbaikan status gizi pada Balita yang kekurangan gizi, dan kenaikan berat badan pada Balita yang kekurangan berat badan.

1.6.9.2 Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

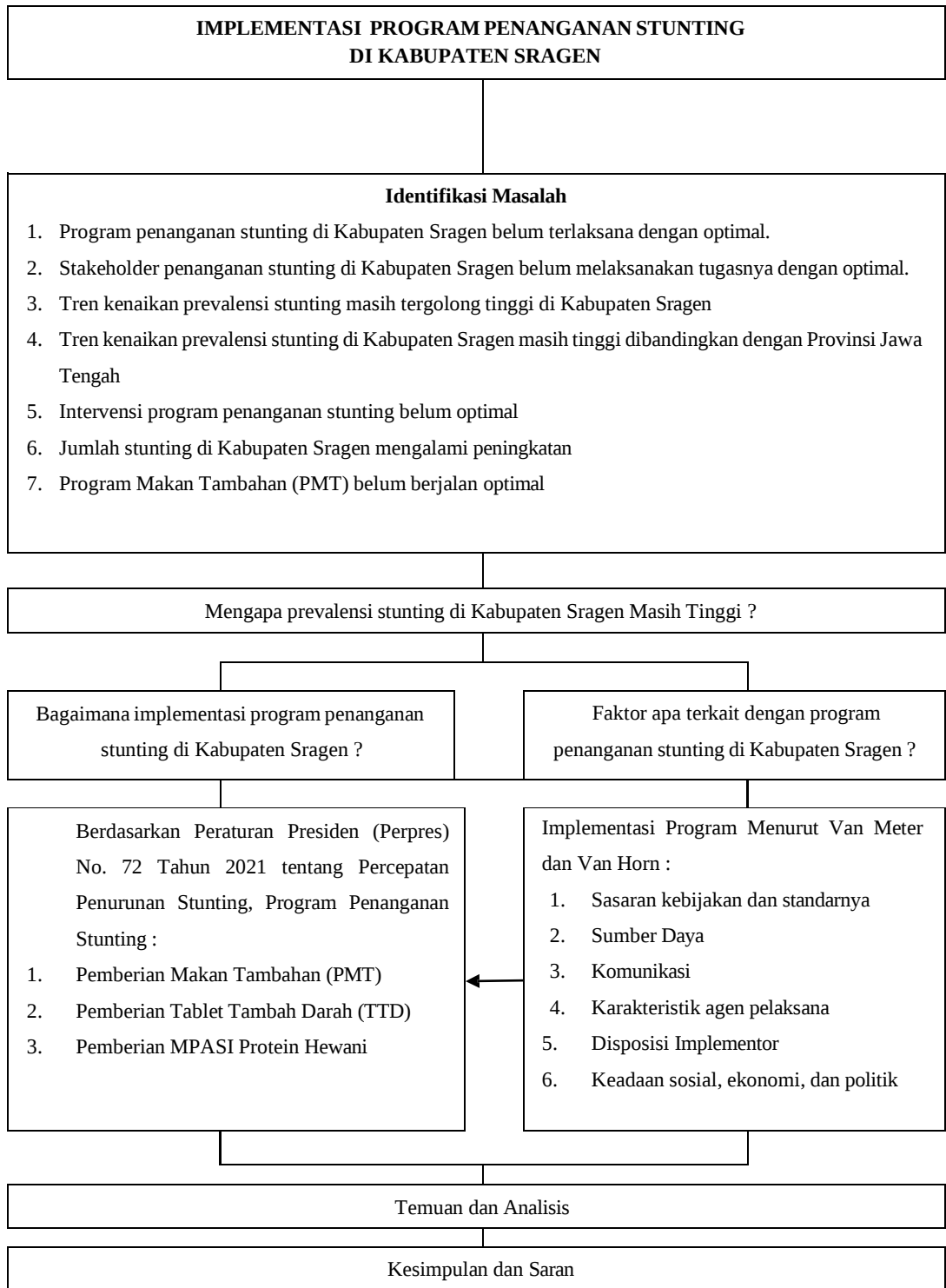
Tujuan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dalam pengobatan stunting adalah untuk mencegah kelahiran bayi dengan tubuh pendek (stunting) atau berat badan lahir rendah (BBLR). Dengan mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur, diharapkan risiko anemia pada remaja putri akan berkurang, sehingga jumlah bayi yang lahir dengan stunting di Indonesia dapat diminimalkan.

1.6.9.3 MPASI Kaya Protein Hewani

Dalam penanganan stunting, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang kaya protein hewani bagi baduta bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko stunting pada anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengusulkan MP-ASI yang kaya protein hewani sebagai tema Hari Gizi Nasional ke-64 tahun 2024. Tubuh membutuhkan asam amino esensial yang lebih banyak dari protein hewani daripada protein nabati. Anak-anak memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik jika mereka mengonsumsi protein hewani yang cukup. Kemampuan untuk meningkatkan kadar insulin, yang merupakan

mediator penting dalam pembentukan matriks tulang, sangat terkait dengan kualitas protein ini. Mengandung zat besi yang penting untuk mencegah anemia, selain menjadi sumber protein hewani. Anemia dapat meningkatkan risiko stunting pada anak.

1.7 Kerangka Berpikir Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Implementasi program adalah proses di mana kebijakan atau program yang telah direncanakan dilaksanakan dalam praktik, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, seperti sumber daya, koordinasi, serta peran pelaksana di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi nasional untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan gizi dan kesehatan ibu hamil, balita, serta anak-anak.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi program penanganan stunting menurut Van Meter dan Van Horn, antara lain :

1. Sasaran Kebijakan dan Standarnya
2. Sumber Daya
3. Komunikasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Disposisi Implementor
6. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Tabel 3. 2 Fenomena Pengamatan

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati
Program Penanganan Stunting (Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting)	Program Makan Tambahan (PMT)	Ketersediaan dan distribusi PMT
		Partisipasi dan kepatuhan penerima
		Peningkatan status gizi
		Persepsi penerima manfaat
		Efektivitas dalam penurunan
	Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)	Ketersediaan dan distribusi TTD
		Partisipasi dan kepatuhan penerima manfaat
		Peningkatan status hemoglobin
		Persepsi dan kepuasan penerima
		Efektivitas dalam pencegahan
	Pemberian MPASI Protein Hewani	Ketersediaan dan distribusi MPASI Protein
		Partisipasi dan kepatuhan penerima manfaat
		Perubahan status gizi bayi dan
		Penerimaan dan kepuasan ibu terhadap
		Efektivitas pemberian MPASI Protein Hewani

Berikut program-program yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)

No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting :

1. Program Makan Tambahan (PMT)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi ibu hamil, balita, dan anak-anak di masa pertumbuhan. Makanan tambahan ini biasanya diberikan dalam bentuk makanan yang bergizi, seperti biskuit sehat, susu, atau makanan bergizi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. PMT penting karena ibu hamil dan anak-anak dalam usia pertumbuhan membutuhkan asupan gizi yang

mencukupi agar terhindar dari kekurangan nutrisi, yang bisa memicu stunting.

2. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Pemberian tablet tambah darah ditujukan bagi ibu hamil dan remaja putri untuk mencegah anemia. Anemia pada ibu hamil meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, yang merupakan salah satu faktor risiko stunting. Tablet tambah darah ini biasanya mengandung zat besi dan asam folat yang diperlukan untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah.

3. Pemberian MPASI Protein Hewani

MPASI (Makanan Pendamping ASI) dengan protein hewani diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk mendukung kebutuhan nutrisi tambahan selain ASI. Protein hewani, seperti daging, telur, atau ikan, kaya akan zat gizi esensial seperti protein berkualitas tinggi, zat besi, dan vitamin B12 yang sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Program ini bertujuan untuk mencegah kekurangan gizi mikro yang bisa menyebabkan stunting.

Ketiga program ini adalah bagian dari upaya komprehensif yang melibatkan intervensi gizi spesifik untuk mencegah dan menangani stunting. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha mengurangi prevalensi stunting secara signifikan, dengan menargetkan kelompok yang paling rentan, yaitu ibu hamil, bayi, dan balita.

Oleh sebab itu, implementasi program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan kebijakan, ketersediaan sumber daya, efektivitas komunikasi, kapasitas organisasi pelaksana, serta dukungan politik dan sosial masyarakat. Pendekatan komprehensif yang mencakup koordinasi lintas sektoral dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan intervensi gizi ini berhasil dalam menurunkan prevalensi stunting.

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini sangat penting karena akan mendeskripsikan lebih kompleks tentang bagaimana program penanganan stunting di Kabupaten Sragen belum optimal, sehingga memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Sragen.

1.10 Metode Penelitian

Sejalan dengan pendapat Kirk dan Miller, pendekatan kualitatif mengacu pada budaya ilmu pengetahuan sosial tertentu yang mana sebagian besar berpedoman pada pengamatan orang di dalam wilayahnya sendiri.

Menurut Sugiono (2012 : 9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Peneliti menggunakan posisi mereka sebagai instrumen utama, menggunakan triangulasi sebagai metode pengumpulan data, dan menganalisis data secara kualitatif.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Menurut Rukajat (2018), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan aktual, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. dan fenomena tersebut.

Adiputra *et al.*, (2021) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena saat ini, yaitu fenomena alam atau buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak bertujuan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Banyak pertanyaan yang muncul tentang masalah kesehatan seperti mortalitas dan morbiditas, terutama tentang seberapa besar, luas, dan pentingnya masalah tersebut, mendorong penelitian deskriptif.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih lengkap, jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dengan kualitatif deskriptif. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan

lokasi penelitian yang akan menjadi tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam hal ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang terletak di Jl. Sukowati No.185, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen merupakan instansi yang menangani dan mengawasi keberjalanan program stunting di Kabupaten Sragen.

Lokus lain yang diambil oleh penulis yaitu Puskesmas Masaran I dan Posyandu Puri Waluyo III sebagai sample dalam pengambilan dokumentasi dan observasi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen merupakan instansi utama pelaksanaan program penanganan *stunting*, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih dalam agar dihasilkan *output* penelitian yang komprehensif. Oleh sebab itu, subjek penelitian yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen tepatnya pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta Sub Bagian Kesehatan dan Masyarakat.

Selain itu, penulis juga mengambil subjek penelitian lain sebagai pendalaman dan validasi informasi kepada pihak Puskesmas Masaran I dan Kader Posyandu Puri Waluyo III.

1.10.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), data dibagi menjadi :

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan penulis ke dalam bentuk gambar-gambar, kalimat, pernyataan- pernyataan, dan non-angka yang dapat menguatkan dan memperjelas batas-batas topik penelitian yang dilakukan penulis.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk numerik atau angka, diagram hingga statistik yang dapat mempertegas apakah informasi yang disampaikan penulis valid atau tidak Data kualitatif seringkali digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif.

Penelitian jenis ini membutuhkan data-yang akurat dan terbaru yang selanjutnya akan dilakukan analisis serta diinterpretasikan menjadi sebuah data yang memiliki relevansi terhadap implementasi kebijakan yang sedang dilaksanakan dan dapat memberikan gambaran sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan.

1.10.5 Sumber Data

Berikut jenis-jenis sumber data :

- a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan

langsung dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara disebut data primer. Dalam beberapa kasus penelitian, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dan pengisian kuesioner (Husein Umaar, 2013). Peneliti menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara sebagai sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berfungsi menjadi pelengkap dari data primer disebut sumber data sekunder. Data dari sumber ini tidak diterima secara langsung oleh pengumpul data atau peneliti, tetapi diperoleh melalui perantara, misalnya orang lain ataupun dalam bentuk dokumen (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan observasi pada website resmi Badan Pusat Statistik dan beberapa jurnal terbaru.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg, wawancara merupakan aktivitas bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Esterberg turut mengemukakan beberapa macam wawancara, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data yakin akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan jawaban alternatif yang telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Dalam wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat jawabannya (Sugiyono, 2019).

Sementara itu, wawancara semi terstruktur termasuk ke dalam kategori in-depth interview, dimana pelaksanaannya lebih fleksibel jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk menyampaikan pendapat dan idenya (Sugiyono, 2019).

Selain wawancara terstruktur dan semi terstruktur, terdapat pula wawancara tidak terstruktur yang didefinisikan sebagai wawancara yang membebaskan peneliti untuk tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang hendak ditanyakan kepada narasumber guna menggali informasi lebih dalam (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur agar penulis lebih mudah untuk melakukan analisis data.

b. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Sugiyono (2019), mendefinisikan dokumentasi adalah pengumpulan data peristiwa masa lalu dengan cara didokumentasikan. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang; contohnya adalah catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan; gambar, misalnya, foto, gambar hidup, dan sketsa; dan karya seni, misalnya, gambar, patung, dan film. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi membantu observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil dokumen berbentuk gambar melalui website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, narasumber, dan dokumentasi terlampir.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung serta

pada saat selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Apabila jawaban yang diberikan narasumber kurang memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi hingga tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Kegiatan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi atau dikenal dengan Analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019).

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau kombinasi keduanya (triangulasi). Data yang dikumpulkan banyak karena pengumpulannya berlangsung sehari-hari, bahkan berbulan-bulan. Pada awal penjelajahan umum ke situasi sosial dan obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar telah direkam. Oleh sebab itu, peneliti akan memperoleh sejumlah besar data yang sangat bervariasi (Sugiyono, 2019).

4. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup beragam, sehingga diperlukan pencatatan dengan teliti dan rinci. Seperti yang disebutkan sebelumnya,

jumlah data yang dikumpulkan akan semakin kompleks dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan. Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan mengurangnya. Sementara itu, mereduksi data berarti merangkum, memilah, dan memilih elemen penting, memfokuskan pada elemen penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan pencarian data saat diperlukan (Sugiyono, 2019).

5. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Teks naratif merupakan cara yang paling umum yang digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan memberikan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2019).

6. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru (Sugiyono, 2019).

1.10.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Kualitas data pada penelitian kualitatif cenderung fokus pada kualitas data sebelumnya telah diperoleh kemudian diolah oleh penulis. Kredibilitas dari suatu data yang dihasilkan harus dapat dipercaya dan pastinya relevan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini.

Pemeriksaan kualitas data (*goodness criteria*) atau uji keabsahan data evaluasi terhadap kepercayaan data penelitian guna memastikan kebenarannya. Pada penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2012 : 27)0, sebagai berikut :

a. Uji Kredibilitas (validitas internal)

Uji kredibilitas (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif meliputi dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2019).

Berikut alat uji kredibilitas menurut Sugiyono :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian. Tujuan utama dari perpanjangan pengamatan adalah untuk menguji apakah data yang dikumpulkan benar, tidak berubah, atau tidak. Jika data yang dicek kembali ke lapangan data benar dan tidak berubah, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2019).

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berurutan secara sistematis untuk mencatat kepastian data dan urutan kronologi peristiwa.

Salah satu cara untuk mengontrol apakah pekerjaan yang dibuat dan disajikan benar adalah meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2019).

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan kegiatan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada triangulasi, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2019).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti deskripsi, kategorisasi, perspektif yang sama atau berbeda, dan karakteristik yang unik. Setelah data telah dianalisis oleh peneliti untuk sampai pada kesimpulan, mereka diminta untuk memastikan bahwa pandangan yang sama atau berbeda dari setiap sumber data tersebar (Sugiyono, 2019).

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi metode pengujian kredibilitas data melibatkan penggunaan berbagai metode untuk mengevaluasi sumber data yang sama. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara dievaluasi dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner (Sugiyono, 2019).

c. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari, ketika narasumber masih segar dan tidak banyak masalah, akan lebih valid dan kredibel. Ini dapat diuji dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai situasi dan waktu (Sugiyono, 2019).

d. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif adalah ketika data dalam penelitian tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Ini berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi berarti adanya bukti yang mendukung temuan peneliti. Untuk membuat laporan penelitian lebih dapat dipercaya, data-data harus dilengkapi dengan foto atau dokumentasi asli (Sugiyono, 2019).

f. Member Check

Member Check bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Tujuan dari check member adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau narasumber (Sugiyono, 2019).

b. Uji Transferabilitas (validitas eksternal)

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas didefinisikan

sebagai validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan seberapa tepat atau relevan hasil penelitian dengan populasi yang diambil sampelnya. Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan situasi sosial dengan validitas dipertanggungjawabkan yang berbeda, di mana nilai transfer peneliti sangat bergantung pada si pengguna (Sugiyono, 2019).

c. Uji Dependabilitas (Dependability)

Penelitian yang dapat dipercaya, atau penelitian yang dapat dipercaya, adalah penelitian di mana orang lain dengan proses penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama (Sugiyono, 2019).

d. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif, objektivitas juga dikenal sebagai uji validitas penelitian. Jika hasil penelitian disetujui oleh lebih banyak orang, penelitian tersebut dapat dianggap objektif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebenarannya dilakukan ketika hasil penelitian dikaitkan dengan proses. Jika hasil penelitian merupakan bagian dari proses penelitian, maka uji kebenarannya memenuhi standar kebenarannya (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, agar lebih terarah tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi program penanganan stunting di Kabupaten Sragen maka peneliti menggunakan *Triangulasi Sumber*.

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan, mengkategorikan pandangan mana yang sama dan yang berbeda dari jawaban wawancara subjek penelitian.